



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



TAHUN 2018



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2018 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya Tahun Anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan berdasarkan permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi seluruh perangkat daerah Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawabankinerja serta bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.

Sengkang, 20 Maret 2019

BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019-2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Wajo **“Wajo yang Berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman”**

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Wajo dapat

secara bersamasama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wajo di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo pada tahun 2018 dapat dikatakan **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemkab Wajo 2018 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemkab Wajo 2018.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 26 sasaran strategis dengan 47 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 menunjukkan bahwa :

1. 14 (Empat Belas) indikator kinerja dengan kategori sangat Memuaskan.
2. 25 (Dua Puluh Lima) indikator kinerja dengan kategori Memuaskan.
3. 5 (Lima) indikator kinerja dengan kategori Cukup Memuaskan.
4. 2 (satu) indikator kinerja dengan kategori Kurang Memuaskan.

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2018 Sangat Baik dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang

didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah masih bersifat *project oriented*, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.

2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Wajo. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarnya.

2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD.
3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.

Semoga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Wajo Yang Sejahtera Secara Merata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR DIAGRAM	
BAB I	
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aparat Pemerintah	2
1.3 Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	16
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II	
II. PERENCANAAN KERJA	
2.1 Visi	25
2.2 Misi	28
2.3 Tujuan dan Sasaran	30
2.4 Rencana Kerja Tahunan 2018	41
BAB III	
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	49
3.2 Capaian Kinerja	55
3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	55
3.2.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	69

3.2.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	83
3.2.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	93
3.2.5 Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	100
3.3 Realisasi Anggaran	114
3.3.1 Pendapatan	116
3.3.2 Belanja Tidak Langsung	118
3.3.3 Belanja Langsung	120
3.3.4 Pembiayaan Daerah	122
IV. PENUTUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 1	31
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 2	33
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 3	35
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 4	37
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 5	38
Tabel 2.6	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 6	39
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kabupaten Wajo	46
Tabel 3.1	Skala Penilaian Pengukuran Positif	50
Tabel 3.2	Skala Penilaian Pengukuran Negatif	50
Tabel 3.3	Pencapaian IKU	51

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Capaian IKU	54
Diagram 2	Perbandingan Antara Target Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wajo	116
Diagram 3	Perbandingan Antara Target Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	118
Diagram 4	Perbandingan Antara Target Anggaran dan Realisasi Belanja	121
Diagram 5	Perbandingan Antara Target Pembiayaan dengan dan Realisasi Pembiayaan	123



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



TAHUN 2018



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dengan mengedepankan wewenang yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 dengan tujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, salah satunya dapat diukur melalui penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP/LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir..

1.2. APARAT PEMERINTAH

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2018 berjumlah 6.622 orang yang terdiri dari :
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

a. Berdasarkan Pendidikan

S.3			S.2			S.1			D.IV			D.III			D.II			D.I			SMA			SMP			SD			TOTAL	
L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		
4	3	7	311	201	512	1,435	2,319	3,754	15	78	93	76	367	443	80	207	287	7	6	13	467	475	942	44	19	63	20	3	23	23	6,137

b. Berdasarkan Golongan Ruang

GOLONGAN IV								GOLONGAN III								GOLONGAN II								GOLONGAN I								TOTAL				
IV/d		IV/c		IV/b		IV/a		JUMLAH	III/d		III/c		III/b		III/a		JUMLAH	II/d		II/c		II/b		II/a		JUMLAH	I/d		I/c		I/b		I/a		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L		P	L		P
1	1	20	2	512	686	337	552	2,111	347	510	356	599	266	465	179	327	3,049	56	108	141	153	64	44	145	220	931	6	2	25	7	4	1	-	1	46	6,137

c. Berdasarkan Jabatan

ESELON																JFU			JFT			TOTAL						
II.a		II.b		III.a		III.b		IV.a		IV.b		V.a		JUMLAH	JFU	JFT	TOTAL											
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P															
1	-	1	35	3	38	46	20	66	96	51	147	349	306	655	112	86	198	8	5	13	1,118	649	718	1,367	1,163	2,489	3,652	6,137

Sumber : Data BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Tahun 2018

1.3. KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

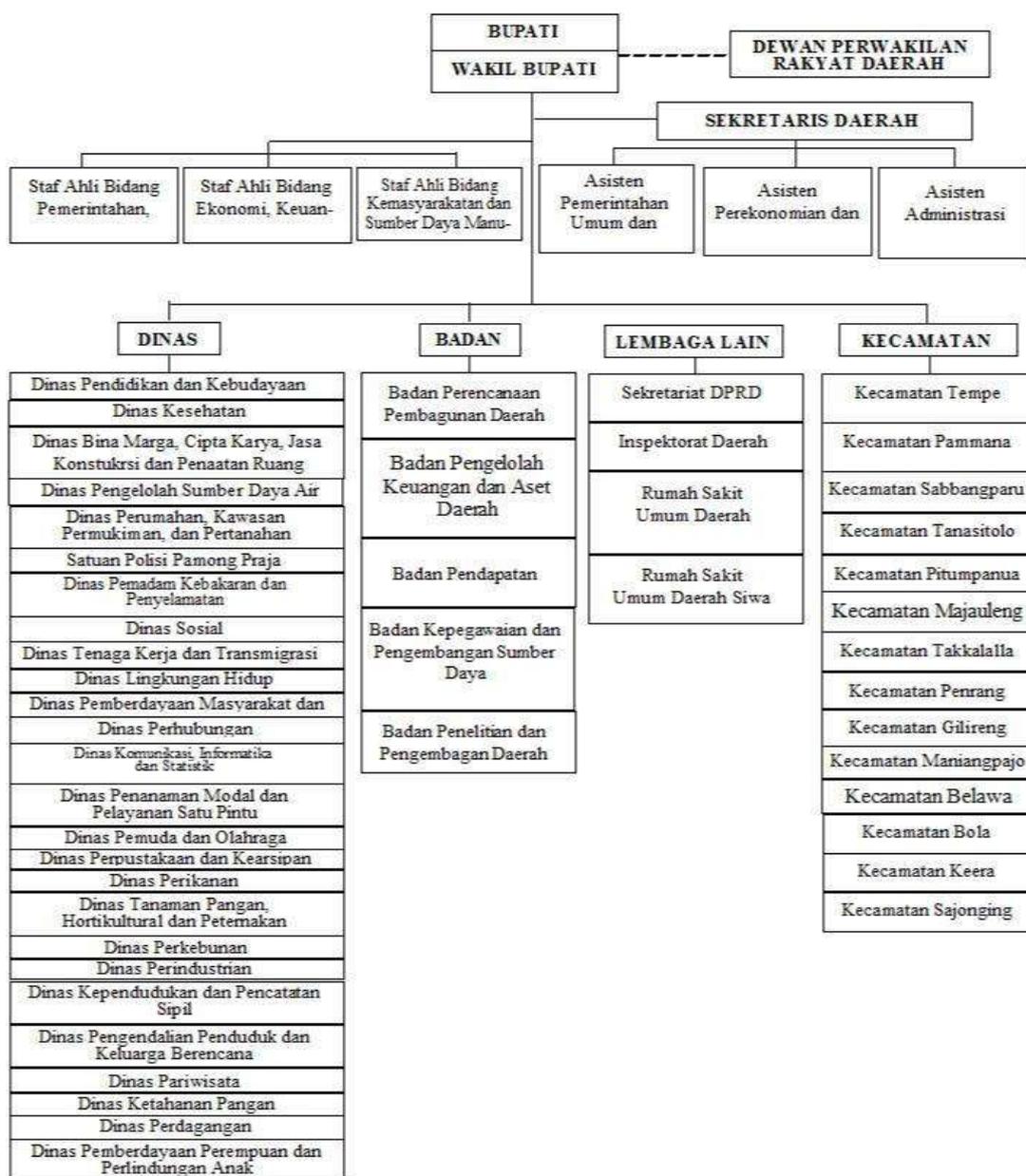
Organisasi perangkat daerah yang merupakan pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235, menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Pemerintah Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat daerah yang merupakan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235, menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang isinya menetapkan organisasi perangkat daerah

Kabupaten Wajo terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Daerah terdiri dari 27 dinas, serta Badan terdiri dari 7 dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 Kecamatan. Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai berikut.

PP NOMOR 18 TAHUN 2016 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016



Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran perangkat daerah Kabupaten Wajo, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Kabupaten adalah unsur staf pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabupaten, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Kabupaten yakni membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Kabupaten.

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana di atas, menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris Daerah

2. Staf Ahli, yang terdiri dari :

- a. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari:

- a). Bagian Pemerintahan
- b). Bagian Organisasi
- c). Bagian Hukum dan HAM
- d). Bagian Kesejahteraan Rakyat

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang terdiri dari :

- a). Bagian Pembangunan.
- b). Bagian Bagian Perekonomian.
- c). Bagian Sumber Daya Alam dan Potensi Daerah
- d). Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Sekretariat DPRD, meliputi :

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana di atas, menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
 - Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
 - Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
 - Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten
1. Sekretaris Dewan.
 2. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 3. Bagian Legislasi;
 4. Bagian Pengawasan dan Penganggaran.

c. Inspektorat Daerah kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, inspektorat Daerah kabupaten dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Inspektorat daerah kabupaten mempunyai tugas

membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi;
- Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Dinas Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan ;
6. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
8. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan urusan pemerintahan bidang Perhubungan ;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik ;
14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Dinas Pemuda dan Olahraga unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
17. Dinas Perikanan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan , Hortikultura dan Peternakan;
20. Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
21. Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
24. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
26. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan;
27. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
28. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Rumah sakit Daerah kabupaten dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Kabupaten. Rumah sakit Daerah kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Dalam hal rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Rumah sakit Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban, dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten diatur dalam Peraturan Presiden.

- f. Badan Daerah kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Daerah kabupaten dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Badan Daerah kabupaten mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Badan Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang sub Keuangan dan Aset ;
3. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Kepegawaian dan Diklat;

5. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian Dan Pengembangan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.
- Camat sebagaimana juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, meliputi :

- a). Kecamatan, terdiri dari :
 1. Camat.
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Seksi Tata Pemerintahan.
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
 7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b). Kelurahan, terdiri dari :
 1. Lurah.
 2. Sekretariat.
 3. Seksi Pemerintahan.
 4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan untuk lebih lengkapnya mengenai jumlah dan nama kecamatan dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yaitu :

- 1). Kecamatan Tempe, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tempe.
 - b. Kelurahan Cempalagi.
 - c. Kelurahan Teddaopu.
 - d. Kelurahan Salomenraleng.
 - e. Kelurahan AttakaE.

- f. Kelurahan WiringpalanaE.
 - g. Kelurahan Laelo.
 - h. Kelurahan Paduppa.
 - i. Kelurahan Siengkang.
 - j. Kelurahan Lapongkoda.
 - k. Kelurahan Pattirosompe.
 - l. Kelurahan WatallipuE.
 - m. Kelurahan Maddukelleng.
 - n. Kelurahan SitampaE.
 - o. Kelurahan Bulupabbulu.
 - p. Kelurahan Mattirotappareng.
- 2). Kecamatan Sabbangparu, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Sompe.
 - b. Kelurahan WallenaE.
 - c. Kelurahan Talotenreng.
- 3). Kecamatan Pammana, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Cina.
 - b. Kelurahan Pammana.
- 4). Kecamatan Tanasitolo, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Baru Tancung.
 - b. Kelurahan Tancung.
 - c. Kelurahan Pincengpute.
 - d. Kelurahan Mappadaelo.
- 5). Kecamatan Gilireng, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Gilireng.
- 6). Kecamatan Majauleng, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Paria.
 - b. Kelurahan Limpomajang.
 - c. Kelurahan Macanang.
 - d. Kelurahan Uraiyang.

- 7). Kecamatan Pitumpanua, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Bulete.
 - b. Kelurahan Siwa.
 - c. Kelurahan Tobarakka.
 - d. Kelurahan Benteng.
- 8). Kecamatan Maniangpajo, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Anabanua.
 - b. Kelurahan DualipoE.
 - c. Kelurahan Tangkoli.
- 9). Kecamatan Sajoanging, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Akkajeng.
 - b. Kelurahan Assorajang.
 - c. Kelurahan MinangaE
- 10). Kecamatan Keera, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Ballere.
- 11). Kecamatan Bola, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Solo.
- 12). Kecamatan Takkalalla, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Peneki.
 - b. Kelurahan Bocco.
- 13). Kecamatan Penrang, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Doping.
- 14). Kecamatan Belawa, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Belawa.
 - b. Kelurahan Macero.

1.4. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Apabila dinamika eksternal selama 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mempertahankan / meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan salah satunya dijawab melalui pengembangan berbagai sistem informasi pembangunan sehingga diharapkan semua informasi pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh *stakeholder*. Namun demikian upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan pembangunan. Kesenjangan antara nilai-nilai filosofi dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat masih cukup tinggi, sehingga perlu segera disikapi, diantisipasi agar kesenjangan tidak semakin lebar.

1.4.1 Isu Strategis Dinamika Internasional

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Beberapa isu strategis global yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan di daerah sebagai berikut.

1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Masalah lingkungan hidup berkelanjutan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor iklim, faktor temperatur, faktor curah hujan, faktor kelembaban, faktor tekanan udara dan lain-lain. Akan tetapi selain faktor dimaksud, aktivitas manusia juga mempengaruhi masalah lingkungan hidup berkelanjutan terutama perubahan iklim dan bencana alam. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penebangan hutan secara liar yang mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan

juga tidak luput dari factor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal. Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut.

2. Terorisme global

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnegara dalam memerangi terorisme internasional.

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme

internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.

3. Perdagangan Bebas

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*), dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruhan pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.

Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.

4. Demokrasi dan HAM

Setiap tahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintah- pemerintah otoriter di dunia walaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Bahkan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika-dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

5. Human Trafficking.

Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam *human trafficking*. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.

Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana 2 (dua) komponen yang saling memperkuat yakni antara kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki. Sulawesi Selatan dapat mengambil peran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

6. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (Millenium Development Goals) untuk meneruskan dan memantapkan MDGs agar lebih berkelanjutan dan selamanya. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun di seluruh penjuru dunia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala umur.
4. **Pendidikan Berkualitas.** Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. **Kesetaraan Gender.** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi.** Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. **Energi Bersih dan Terjangkau.** Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak.** Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur.** Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. **Mengurangi Kesenjangan.** Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas.** Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.** Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. **Aksi Terhadap Iklim.** Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kehidupan Bawah Laut.** Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. **Kehidupan di Darat.** Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian.** Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.** Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018, LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2018 berupa Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kewenangan, Tugas Pokok Organisasi serta Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016, dan Isu-isu Strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Rencana Kerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2018, serta Rencana Kinerja Tahun 2018, sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2018, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2018 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat pada tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap Ketiga RPJPD Kabupaten Wajo tahun 2005-2025. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Adapun visi RPJPD Kabupaten Wajo tahun 2005 – 2025 sebagaimana tertuang dalam 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025, adalah :

“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Wajo dengan Jiwa Kemandirian dan Pemerintah yang Demokratis Bernafaskan Keagamaan”

Melihat pada visi RPJPD Kabupaten Wajo di atas, dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik global, nasional, regional dan daerah, maka visi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014 - 2019, yaitu:

“Wajo yang Berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman”

Berdasarkan rumusan visi RPJMD Kabupaten Wajo 2014-2019, terdapat 4 (empat) pokok visi yakni berkarakter religius, produktif, unggul, sejahtera dan aman. Penjelasan dari setiap pokok visi tersebut, sebagai berikut.

Berkarakter religius adalah kondisi masyarakat bersama aparat pemerintah daerah lima tahun ke depan yang memiliki sikap dan perilaku berbasis kearifan budaya lokal Wajo yang senantiasa dinafasi oleh kehidupan keagamaan yang kuat. Kearifan budaya lokal dimaksud adalah nilai sosial-budaya yang dianut masyarakat secara turun temurun dan perlu terus diaktualkan yakni nilai *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakalebbi* (saling menghargai) dan *sipakaingeng* (saling mengingatkan). Karakter religius sebagai modal dasar pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Wajo ini dapat berkembang jika kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat cukup tinggi dan merata pada seluruh wilayah sehigga sejalan dengan pandangan leluhur orang Wajo bahwa *maccapa na warani, malempu na magetteng* (hanya dengan kecerdasan seseorang akan berani, lurus dan teguh pendirian).

Produktif adalah kondisi masyarakat yang memanifestasikan etos kerja *yassiwajori* dan akhirnya menumbuhkan sikap kemandirian. Produktif dalam pengertian lebih luas adalah jiwa, sikap dan perilaku yang senantiasa berorientasi pada efesiensi dan efektifitas sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan perekonomian daerah tumbuh secara konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Unggul adalah kondisi dimana produk/komoditas unggulan berkembang dengan daya saing yang tinggi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, baik pada sektor pertanian maupun industri kreatif. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini

secara kewilayahan berinterkoneksi satu sama lain dengan dukungan infrastruktur transportasi dan perhubungan, irigasi dan sumberdaya air, serta kondisi lingkungan hidup pada wilayah perkotaan, pesisir, sungai dan danau yang terjaga kelestarian fungsifungsinya. Keunggulan ini dapat dicapai bila manusia Wajo cerdas dan sehat (*macca na paulle*) sehingga daya saing daerah juga tinggi.

Sejahtera

adalah taraf hidup masyarakat yang berada di atas pemenuhan kebutuhan dasar baik dilihat dari kemakmuran ekonomi maupun kesejahteraan sosial dengan senantiasa mendapatkan rakhmat (*pammase*) dari Allah SWT. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, kemiskinan yang terus berkurang, pendapatan masyarakat yang terus meningkat.

Aman

adalah suatu tatanan kehidupan yang diharapkan senantiasa tercipta dari pembinaan ketertiban masyarakat, terbukanya ruang kehidupan politik dan pemerintah yang demokratis, terjalinnya kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta berperannya semua stakeholder dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan daerah. Rasa aman dan tenteram ini senantiasa dibangun dengan prinsip kehidupan dalam tatanan kearifan lokal budaya Wajo : *Maradeka to Wajoe Taro Pasoro Gaukna, Naisseng Alena, Ade'na Na Popuang.*

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak dijalankan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi RPJMD Kabupaten Wajo 2014 - 2019 dapat dipaparkan seperti berikut.

Misi 1 : Mengembangkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter realigius untuk mampu bersaing secara regional dan nasional.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok terkait pengembangan kehidupan beragama, pembangunan kebudayaan, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, penguatan daya saing tenaga kerja, pembinaan pemuda dan olah raga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Misi 2 : Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam peningkatan infrastruktur wilayah khususnya transportasi dan perhubungan, infrastruktur pembangunan irigasi dan sumberdaya air, serta infrastruktur pemukiman dan lingkungan hidup, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, pengembangan agribisnis dan

agroindustri, pengembangan peternakan dan perikanan, dan pengembangan industri kreatif.

Misi 3 : Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam peningkatan pendapatan daerah, perbaikan investasi, pengembangan perdagangan, pengembangan koperasi dan UKM, pengembangan industri kreatif dan kerajinan rakyat, pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, pengembangan pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4 : Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam perbaikan sistem perencanaan pembangunan daerah, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, perbaikan sistem administrasi keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius, demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kehidupan politik dan demokrasi; penguatan kesatuan bangsa; penanganan konflik sosial; dan peningkatan kapasitas penanganan bencana.

Misi 6 : Meningkatkan kapasitas aparat dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa, peningkatan

kompetensi dan kesejahteraan aparat pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, pengembangan sistem pelayanan publik satu atap, penataan keorganisasi dan kelembagaan SKPD.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo 2014 - 2019 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 1 (Pertama)

Misi 1 : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter religius
untuk mampu bersaing secara regional dan nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 1 : Meningkatkan keterpenuhan sarana ibadah										
1.	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah	Tempat Ibadah berkualitas baik	Persentase	Persen						Persen
Tujuan 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan										
2.	Meningkatnya indeks pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,33 Tahun						Tahun
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,51 Tahun						Tahun
		Angka Melek Huruf	Persentase	96,43 Persen						Persen
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat										
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	Persentase	Persen						Persen
		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,4 Tahun						Tahun
Tujuan 4 : Memperkuat ketahanan budaya daerah										

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
4. Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli	Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional	Jumlah	2 Cagar Budaya	0	0	0	1	0	3 Cagar Budaya
Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja									
5. Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase	3,72 Persen	5,39					Persen
Tujuan 6 : Meningkatkan prestasi keolahragaan									
6. Meningkatnya prestasi keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	Cabang Olah raga	Cabang Olah Raga						Cabang Olah Raga
Tujuan 7 : Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga									
7. Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala							
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skala							
Tujuan 8 : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
8. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Persentase	69,26 Persen	71	76	80	85	90	90 Persen

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	Persentase	Persen						Persen
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase	10,79 Persen	20	35	50	60	75	75 Persen

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 2 (Kedua)

Misi 2 : Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastuktur dalam mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 9 : Meningkatkan kapasitas dan jangkauan sarana dan prasarana transportasi										
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	51 Persen	53	56	60	63	66	66 Persen
		Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	22,73 Persen						Persen

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 10 : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan										
10. Meningkatnya kapasitas perhubungan	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	Unit	Unit							Unit
	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	Persentase	Persen							Persen
Tujuan 11 : Meningkatkan kapasitas jaringan irigasi										
11. Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	Cakupan layanan irigasi	Persentase	27,86 Persen	28,50	30	32	34	35	35	Persen
Tujuan 12 : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman										
12. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh	Persentase	3,47 Persen	1,98	0,62	0,24	0,11	0,11	0,11	Persen
	Rumah tangga bersanitasi	Persentase	86 Persen	88	91	93	96	98	98	Persen
	Rasio rumah layak huni	Persentase	79,04 Persen	78,61	78,18	77,76	77,35	76,94	76,94	Persen
Tujuan 13 : Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan kritis serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan										
13. Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	Persentase	75,58 Persen							100 Persen

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah produktifitas kokon	Kg	18 Kg	23	25	30	36	45	159 Kg	
Tujuan 14 : Mengembangkan kawasan terpadu										
14.	Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu	Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan	Kawasan	0 Kawasan	0	0	0	1	0	1 Kawasan

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 3 (Ketiga)

Misi 3 : Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 15 : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan ketahanan pangan daerah										
15.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai Ekspor	Milyar Rp	252,1 Milyar Rp	232,6	214,6	197,9	182,7	168,5	168,5 Milyar Rp
		Nilai PDRB	Milyar Rp	Milyar Rp						Milyar Rp

	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	Hari							Hari
	Jumlah Kunjungan Wisata	Mancanegara	4,166	Mancanegara						Mancanegara
		Domestik	208,333	Domestik						216,668 Domestik
16. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase	72,3	Persen	76,9	81,5	86,1	90,8	94,4	94,4 Persen
Tujuan 16 : Menurunkan tingkat kemiskinan daerah dan penanganan PMKS										
17. Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	Tingkat kemiskinan	Persentase	8,17	Persen						Persen
	Penanganan PMKS	Persentase	88	Persen	90	90	95	95	100	100 Persen
Tujuan 17 : Mengendalikan pertumbuhan penduduk										
18. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	Persentase	0,84	Persen						Persen
	Rasio akseptor KB	Persentase	67,75	Persen	68,80	69,85	70,90	71,95	72,68	72,68 Persen

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 4 (Empat)

Misi 4 : Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis perdesaan dan perkotaan

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 18 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah										
19.	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	Persentase	80 Persen	80	85	90	95	95	95 Persen
Tujuan 19 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat										
20.	Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	1 Desa	1	1	1	1	1	5 Desa
Tujuan 20 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup										
21.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Lingkungan Hidup	Skala	16,74						
		Ruang Terbuka Hijau	Persentase	0,49 Persen	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54 Persen

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 5 (Kelima)

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius, demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				2015	2016	2017	2018	2019			
Tujuan 21 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram											
22.	Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	Penyelesaian K3	Persentase	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100 Persen
Tujuan 22 : Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat											
23.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Jumlah konflik SARA	Kasus	0 Kasus	0	0	0	0	0	0	Kasus

Tabel 2.6

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 6 (Keenam)

Misi 6 : Meningkatkan kapasitas aparat dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 23 : Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah										
24. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase	4,78 Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05 Persen
	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	Kategori	48 OPD							OPD
Tujuan 24 : Mewujudkan sistem pelayanan publik yang memuaskan										
25. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
Tujuan 25 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN										

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
26. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai evaluasi AKIP	Kategori	CC	CC	CC	CC	C	C	C
	Nilai LPPD	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

2.4 Rencana Kerja Tahunan 2018

Rencana kerja tahun 2018 Kabupaten Wajo merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah dirumuskan dan ditetapkan didalam RPJMD 2014 - 2019 meliputi 25 Tujuan dan 26 Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama**, Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**, dengan Indikator kinerja :
 1. Tempat Ibadah berkualitas baik dengan target 623 Unit.
2. **Sasaran Kedua**, Meningkatnya indeks pendidikan program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target 6.83 %.
 2. Harapan Lama Sekolah dengan Target 13.11 %
 3. Angka Melek huruf dengan target 92.25%
3. **Sasaran Ketiga**, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Presentase kepesertaan JKN dengan target 95.78%
 2. Angka Usia Harapan Hidup dengan target 66.71% per Tahun
4. **Sasaran Keempat**, Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, dengan Indikator kinerja :

1. Jumlah Sistus Cagar Budaya yang ditetaopkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan target 1 Unit
5. **Sasaran Kelima**, Meningkatnya kesempatan kerja, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5.27 %
6. **Sasaran Keenam**, Meningkatnya prestasi keolahragaan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemuda dan Olahraga**, dengan Indikator kinerja :
 1. Jumlah cabag olahraga yang mendapatkan prestasi dengan target 22 Cabang Olahraga.
7. **Sasaran Ketujuh**, Meningkatnya kesetaraan gender, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Indeks Pembagunan Gender (IPG) dengan target 91%.
 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) dengan target 61 %
8. **Sasaran Kedelapan**, Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator kinerja :
 1. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan target 85 %
 2. Presentase Kepemilikan Akta Nikah dengan target 7.21 %
 3. Presentase Kepemilikan AKta Kelahiran dengan targert 75 %
9. **Sasaran Kesembilan**, Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Bina Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang**, dengan Indikator kinerja :
 1. Proporsi panjang jalan kabupaten dalam konsisi baik dengan target 63 %
 2. Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dengan target 33.75 %

- 10. Sasaran Kesepuluh,** Meningkatnya kapasitas perhubungan program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan,** dengan Indikator kinerja :
1. Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik dengan target 5 Unit
 2. Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan dengan target 0.00071 %
- 11. Sasaran Kesebelas,** Meningkatnya cakupan dan efektivitas laynan irigasi, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pengelola Sumber Daya Air,** dengan Indikator kinerja :
1. Cakupan layanan irigasi dengan target 34 %
- 12. Sasaran Keduabelas,** Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,** dengan Indikator kinerja :
1. Lingkungan permukiman kumuh dengan target 5.53 %
 2. Rumah tangga bersanitasi dengan target 96 %
 3. Rasio rumah layak huni target 0.3779 %
- 13. Sasaran Ketigabelas,** Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Dinas Perkebunan,** dengan Indikator kinerja :
1. Presntase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Kunak Mesin (ATBM) dengan target 78.96 %
 2. Jumlah produktifitas kokon dengan target 36 Ton
- 14. Sasaran Keempatbelas,** Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Peternakan,** dengan Indikator kinerja :
1. Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan denga target 1 Kawasan
- 15. Sasaran Kelimabelas,** Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Pusan Statistik dan Dinas Pariwisata,** dengan Indikator kinerja :

1. Nilai Ekspor dengan target Rp. 363.027.246.41,-
 2. Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) denbgan target Rp 18.119.010.29,-
 3. Lama Tinggal Wisatawan dengan target 3 Hari
 4. Jumlah Kunjungan Wisata dengan targer 3300 Orang Mancanegara
 5. Jumlah Kunjungan Wisata dengan target 68.782 Orang Domestik
- 16. Sasaran Keenambelas,** Meningkatnya ketahanan pangan daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Ketahanan Pangan,** dengan Indikator kinerja :
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90.8 %
- 17. Sasaran Ketujuhbelas,** Menurunnya tingkat kemiskinan dan penangan Penganan Masalah Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial,** dengan Indikator kinerja :
1. Tingkat Kemiskinan dengan target 7.38 %
 2. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dengan target 95 %
- 18. Sasaran Kedelapanbelas,** Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,** dengan Indikator kinerja :
1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan target 0.84 %
 2. Rasio akseptor KB dengan target 71.95 %
- 19. Sasaran Kesembilanbelas,** Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,** dengan Indikator kinerja :
1. Presentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD dengan target 95 %
- 20. Sasaran Keduapuluh,** Meningkatnya keberdayaan desa, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,** dengan Indikator kinerja :
1. Jumlah desa Mandiri dengan target 1 Desa

- 21. Sasaran Kedua puluh satu** , Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Lingkungan Hidup**, dengan Indikator kinerja :
1. Indeks Lingkungan Hidup dengan target 66.3 %
 2. Ruang Terbuka Hijau dengan target 0.53 %
- 22. Sasaran Kedua puluh dua**, Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja**, dengan Indikator kinerja :
1. Penyelesaian K3 dengan target 100 %
- 23. Sasaran Kedua puluh Tiga**, Meningkatnya kerukunan hidup, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dengan Indikator kinerja :
1. Jumlah Konflik SARA dengan target 0 konflik
- 24. Sasaran Kedua puluh empat**, Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**, dengan Indikator kinerja :
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 dengan target 0.05 %
 2. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik dengan target 53 Organisasi Perangkat Daerah
- 25. Sasaran Kedua puluh lima** , Meningkatnya kualitas pelayanan publik, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelola**, dengan Indikator kinerja :
1. Rata-rata indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan target 76.40 adalah Baik
- 26. Sasaran Kedua puluh enam**, Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**, dengan Indikator kinerja :

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target "WTP"
2. Nilai Evaluasi AKIP dengan target "C"
3. Nilai LPPD dengan target "Sedang"

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN WAJO

SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	
1	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah	1	Tempat Ibadah berkualitas baik	623	Unit
2	Meningkatnya indeks pendidikan	2	Rata-rata Lama Sekolah	6.83	%
		3	Harapan Lama Sekolah	13.11	%
		4	Angka Melek Huruf	98.25	%
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	dsb	95.78	%
		6	Angka Usia Harapan Hidup	66.71	Tahun
4	Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli	7	Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional	1	Unit
5	Meningkatnya kesempatan kerja	8	Tingkat pengangguran Terbuka	5.27	%
6	Meningkatnya prestasi keolahragaan	9	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	22	Cabang Olahraga
7	Meningkatnya kesetaraan gender	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91	%
		11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61	%
8	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	12	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	85	%
		13	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	7.21	%
		14	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	75	%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	15	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	63	%
		16	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	33.75	%
10	Meningkatnya kapasitas perhubungan	17	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	5	Unit

		18	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	0.0071	%
11	Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	19	Cakupan layanan irigasi	34	%
12	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	20	Lingkungan permukiman kumuh	5.53	%
		21	Rumah tangga bersanitasi	96	%
		22	Rasio rumah layak huni	0.3779	%
13	Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	23	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	78.96	%
		24	Jumlah produktifitas kokon	36	Ton
14	Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu	25	Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan	1	Kawasan
15	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	26	Nilai Ekspor	363,027,246.41	Ribu Rupiah
		27	Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	18,119,010.29	Juta Rupiah
		28	Lama Tinggal Wisatawan	3	Hari
		29	Jumlah Kunjungan Wisata	3300	Orang Mancanegara
		30	Jumlah Kunjungan Wisata	68,782	Orang Domestik
16	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	31	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.8	%
17	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	32	Tingkat kemiskinan	7.38	%
		33	Penanganan PMKS	95	%
18	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	34	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	0.84	%
		35	Rasio akseptor KB	71.95	%
19	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	36	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	95	%
20	Meningkatnya keberdayaan desa	37	Jumlah Desa Mandiri	1	Desa
21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	38	Indeks Lingkungan Hidup	66.3	%
		39	Ruang Terbuka Hijau	0.53	%

22	Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	40	Penyelesaian K3	100	%
23	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	41	Jumlah konflik SARA	0	konflik
24	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	42	Rasio lulusan S1/S2/S3	0.05	%
		43	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	53	OPD
25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	44	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar		B
26	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	45	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah		WTP
		46	Nilai evaluasi AKIP		C
		47	Nilai LPPD		Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Wajo Tahun 2019 (Lampiran 1)

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Wajo selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Wajo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang. Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Memuaskan
3	75% sampai 100%	Memuaskan
2	55% sampai 75%	Cukup Memuaskan
1	Kurang dari 55%	Kurang Memuaskan

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang Memuaskan
2	75% sampai 100%	Cukup Memuaskan
3	55% sampai 75%	Memuaskan
4	Kurang dari 55%	Sangat Memuaskan

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Wajo. Pencapaian kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama)Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kabupaten Wajo Tahun 2018**

SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018		REALISASI TAHUN 2018		CAPAIAN TAHUN 2018	NILAI
1	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah	1	Tempat Ibadah berkualitas baik	623	Unit	622	Unit	99,84 %	Memuaskan
2	Meningkatnya indeks pendidikan	2	Rata-rata Lama Sekolah	6,83	%	6,78	%	99,27 %	Memuaskan
		3	Harapan Lama Sekolah	13,11	%	13,09	%	99,85 %	Memuaskan
		4	Angka Melek Huruf	98,25	%	96,11	%	97,82 %	Memuaskan
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Persentase kepesertaan JKN	95,78	%	100	%	104,41 %	Sangat Memuaskan
		6	Angka Usia Harapan Hidup	66,71	Tahun	66,52	%	99,72 %	Memuaskan
4	Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli	7	Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional	1	Unit	1	Unit	100 %	Memuaskan
5	Meningkatnya kesempatan kerja	8	Tingkat pengangguran Terbuka	5,27	%	3,06	%	58,06 %	Cukup Memuaskan
6	Meningkatnya prestasi keolahragaan	9	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	22	Cabang Olah raga	14	Cabang Olah Raga	63,64 %	Cukup Memuaskan
7	Meningkatnya kesetaraan gender	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91	%	89,90	%	98,79 %	Memuaskan
		11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61	%	60,62	%	99,38 %	Memuaskan
8	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	12	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	85	%	99,11	%	116,60 %	Sangat Memuaskan
		13	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	7,21	%	13,40	%	185,85 %	Sangat Memuaskan
		14	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	75	%	93,30	%	124,40 %	Sangat Memuaskan
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	15	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	63	%	32,96	%	52,32 %	Kurang Memuaskan
		16	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	33,75	%	22,73	%	67,35 %	Cukup Memuaskan
10	Meningkatnya kapasitas perhubungan	17	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	5	Unit	5	Unit	100 %	Memuaskan

		18	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	0,0071	%	0,0067	%	94,37	%	Memuaskan
11	Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	19	Cakupan layanan irigasi	34	%	41,02	%	120,65	%	Sangat Memuaskan
12	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	20	Lingkungan permukiman kumuh	5,53	%	5,45	%	98,55	%	Memuaskan
		21	Rumah tangga bersanitasi	96	%	100	%	104,17	%	Sangat Memuaskan
		22	Rasio rumah layak huni	0,3779	%	0,26	%	67,90	%	Cukup Memuaskan
13	Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	23	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	78,96	%	100	%	126,65	%	Sangat Memuaskan
		24	Jumlah produktifitas kokon	36	Ton	13,5	Ton	37,50	%	Kurang Memuaskan
14	Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu	25	Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan	1	Kawasan	1	Kawasan	100	%	Memuaskan
15	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	26	Nilai Ekspor	363.027.246,41	Ribu Rupiah	573.080.790,86	Ribu Rupiah	157,86	%	Sangat Memuaskan
		27	Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	18.119.010,29	Juta Rupiah	17.897.718	Juta Rupiah	98,78	%	Memuaskan
		28	Lama Tinggal Wisatawan	3	Hari	3	Hari	100	%	Memuaskan
		29	Jumlah Kunjungan Wisata	3300	Orang Manca negara	3.510	Orang Manca negara	106,36	%	Sangat Memuaskan
		30	Jumlah Kunjungan Wisata	68.782	Orang Domestik	79.005	Orang Domestik	114,86	%	Sangat Memuaskan
16	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	31	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,8	%	90,5	%	99,67	%	Memuaskan
17	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	32	Tingkat kemiskinan	7,38	%	7,46	%	101,08	%	Kurang Memuaskan
		33	Penanganan PMKS	95	%	78	%	82,11	%	Cukup Memuaskan
18	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	34	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	0,84	%	0,28	%	33,33	%	Sangat Memuaskan
		35	Rasio akseptor KB	71,95	%	83,20	%	115,64	%	Sangat Memuaskan
19	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	36	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	95	%	95	%	100	%	Memuaskan
20	Meningkatnya keberdayaan desa	37	Jumlah Desa Mandiri	1	Desa	1	Desa	100	%	Memuaskan

21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	38	Indeks Lingkungan Hidup	66,3 %	60 %	90,50 %	Memuaskan
		39	Ruang Terbuka Hijau	0,53 %	0,54 %	101,89 %	Sangat Memuaskan
22	Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	40	Penyelesaian K3	100 %	90,58 %	90,58 %	Memuaskan
23	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	41	Jumlah konflik SARA	0 konflik	0 konflik	100 %	Memuaskan
24	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	42	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,05 %	6,020 %	12.040 %	Sangat Memuaskan
		43	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	53 OPD	53 OPD	100 %	Memuaskan
25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	44	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B	B	100 %	Memuaskan
26	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	45	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %	Memuaskan
		46	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	100 %	Memuaskan
		47	Nilai LPPD	Sedang	Sangat Tinggi	100 %	Memuaskan
Rata – Rata Capaian						352,12 %	

*Keterangan Tabel : Indikator Kinerja nomor 32, 33, dan 34 merupakan indikator sasaran yang mempunyai makna progres negatif (lihat Tabel 3.2)

Keterangan Warna :

-  = Sangat Memuaskan (lebih dari 100%)
-  = Memuaskan (75% sampai 100%)
-  = Cukup Memuaskan (55% sampai 75%)
-  = Kurang Memuaskan (Kurang dari 55%)

Diagram 1
Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama)

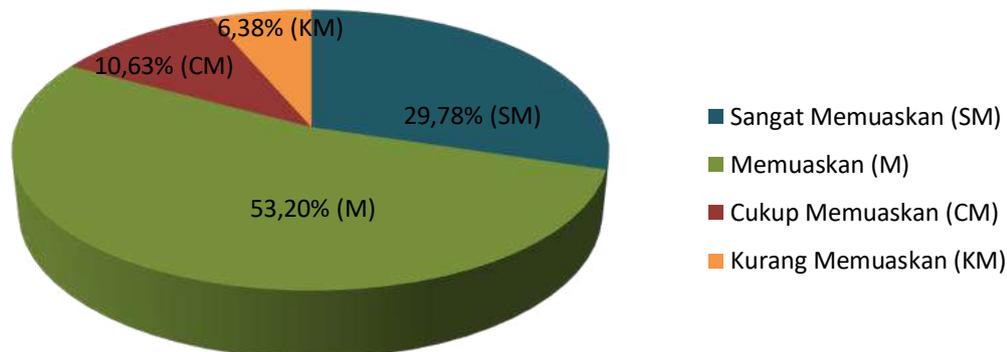


Diagram 1 Capaian IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun **2014-2019** sebanyak **47 (empat puluh tujuh)** indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- **Sangat Memuaskan (lebih dari 100 persen) sebanyak 14 indikator**
- **Memuaskan (capaian di antara 75 persen-100 persen) sebanyak 25 indikator**
- **Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 5 indikator**
- **Kurang memuaskan (capaian kurang dari 55 persen) sebanyak 3 indikator**

*Dari 47 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **29,78%** telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, **53,20%** telah memenuhi kriteria memuaskan, **10,63%** telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, **6,38%** telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Wajo Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.*

3.2. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran 1

Analisis pencapaian **Sasaran 1: Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah	Tempat Ibadah berkualitas baik	Unit	622	623	99,84
Rata-rata capaian					99,84

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **99,84%**. (Lampiran 2).

Sasaran 2

Analisis pencapaian **Sasaran 2 :Meningkatnya Indeks Pendidikan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Meningkatnya Indeks Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya Indeks Pendidikan	Rata - rata lama sekolah	%	6,83	6,87	99,27
	Harapan lama sekolah	%	13,11	13,09	99,85
	Angka melek huruf	%	98,25	96,11	97,82
Rata-rata capaian					98,98

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **98,98%**. (Lampiran 3)



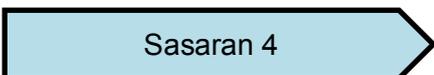
Sasaran 3

Analisis pencapaian **Sasaran 3 :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	%	95,78	100	104,41
	Angka Usia Harapan Hidup	%	66,71	66,52	99,72
Rata-rata capaian					102,06

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **102,06%**. (Lampiran 4)



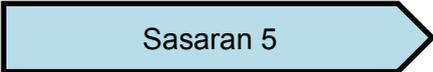
Sasaran 4

Analisis pencapaian **Sasaran 4 :Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli	Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional	Unit	1	1	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 5)



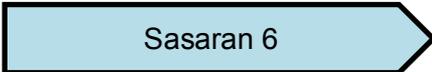
Sasaran 5

Analisis pencapaian **Sasaran 5 :Meningkatnya kesempatan kerja**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Meningkatnya kesempatan kerja,

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	%	5,27	3,06	58,06
Rata-rata capaian					58,06

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** ini belum memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **58,06%**. (Lampiran 6)



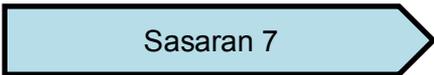
Sasaran 6

Analisis pencapaian **Sasaran 6 :Meningkatnya prestasi keolahragaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Meningkatnya prestasi keolahragaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya prestasi keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	Cabang Olahraga	22	14	63,64
Rata-rata capaian					63,64

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** ini telah memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **63,64%**. (Lampiran 7)



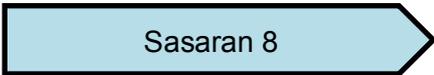
Sasaran 7

Analisis pencapaian **Sasaran 7 :Meningkatnya kesetaraan gender** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Meningkatnya kesetaraan gender

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91	89,90	98,79
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	61	60,62	99,38
Rata-rata capaian					99,08

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **99,08%**. (Lampiran 8)



Sasaran 8

Analisis pencapaian **Sasaran 8 :Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	85	99,11	116,60
	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	%	7,21	13,40	185,85
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	75	93,30	124,40
Rata-rata capaian					142,3

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **142,3%(Lampiran9)**

Sasaran 9

Analisis pencapaian **Sasaran 9 :Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Tabel 3.10 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	63	32,96	52,32
	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	33,75	22,73	67,35
Rata-rata capaian					59,83

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 (dua) indikator kinerja sasaran belum mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata

capaian **59,83%**. (Lampiran 10)

Sasaran 10

Analisis pencapaian **Sasaran 10** :**Meningkatnya kapasitas perhubungan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Meningkatkan kapasitas perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas perhubungan	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	Unit	5	5	100
	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	%	0,0071	0,0067	94,37
Rata-rata capaian					97,185

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kapasitas perhubungan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **97,185%**. (Lampiran 11)

Sasaran 11

Analisis pencapaian **Sasaran 11** :**Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Meningkatkan cakupan dan efektivitas layanan irigasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	Cakupan layanan irigasi	%	34	41,02	120,65
Rata-rata capaian					120,65

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **120,65%**. (Lampiran 12)

Sasaran 12

Analisis pencapaian **Sasaran 12 :Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh	%	5,53	5,45	98,55
	Rumah tangga bersanitasi	%	96	100	104,17
	Rasio rumah layak huni	%	0,3779	0,26	67,90
Rata-rata capaian					90,20

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target.secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **90,20% (Lampiran 13)**

Sasaran 13

Analisis pencapaian **Sasaran 13 : Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	%	78,96	100	126,65
	Jumlah produktifitas kokon	ton	36	13,5	37,50
Rata-rata capaian					82,07

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **82,07%**. (Lampiran 14)

Sasaran 14

Analisis pencapaian **Sasaran 14: Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu	Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan	Kawasan	1	1	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 15)

Sasaran 15

Analisis pencapaian **Sasaran 15: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai Ekspor	Ribu Rupiah	363.027.246,41	573.080.790,86	157,86
	Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	Juta Rupiah	18.119.010,29	17.897.717,7	98,78
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3	3	100
	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang Mancanegara	3.300	3.510	106,36
	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang Domestik	68.782	79.005	114,86
Rata-rata capaian					115,72

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 5 indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **115,72 %**.(Lampiran 16)

Sasaran 16

Analisis pencapaian **Sasaran 16: Meningkatnya ketahanan pangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.16 Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,8	90,5	99,67
Rata-rata capaian					99,67

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **99,67%**. (Lampiran 17)

Sasaran 17

Analisis pencapaian **Sasaran 17:Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	Tingkat kemiskinan	%	7,38	7,46	101,08
	Penanganan PMKS(Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial)	%	95	78	82,11
Rata-rata capaian					91,6

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **91,6%**. (Lampiran 18)

Sasaran 18

Analisis pencapaian **Sasaran 18:Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	%	0,84	0,28	33,33
	Rasio akseptor KB	%	71,95	83,20	115,64
Rata-rata capaian					74,5

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **74,5%**. (Lampiran 19)

Sasaran 19

Analisis pencapaian **Sasaran 19: Meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%	95	95	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 20)

Sasaran 20

Analisis pencapaian **Sasaran 20: Meningkatkan keberdayaan desa**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.20 Meningkatkan keberdayaan desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	1	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran

Meningkatnya keberdayaan desaini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 21)

Sasaran 21

Analisis pencapaian **Sasaran 21:Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Lingkungan Hidup	%	66,3	60	90,50
	Ruang Terbuka Hijau	%	0,53	0,54	101,89
Rata-rata capaian					96,2

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **96,2%** (Lampiran22)

Sasaran 22

Analisis pencapaian **Sasaran 22:Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.22 Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	Penyelesaian K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)	%	100	90,58	90,58
Rata-rata capaian					90,58

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya keberdayaan desa** **Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **90,58%**. (Lampiran 23)

Sasaran 23

Analisis pencapaian **Sasaran 23: Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23 Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)	Konflik	0	0	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 24)

Sasaran 24

Analisis pencapaian **Sasaran 24: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0,05	6,020	12.040
	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	OPD	53	53	100
Rata-rata capaian					6.070

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** ini telah memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **6.070%**. (Lampiran 25)

Sasaran 25

Analisis pencapaian **Sasaran 25: Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.25 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	Nilai	B	B	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 26)

Sasaran 26

Analisis pencapaian **Sasaran 26: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP	WTP	100
	Nilai evaluasi AKIP	nilai	B	B	100
	Nilai LPPD	nilai	sedang	Sangat Tinggi	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%** (**Lampiran 27**)

3.2.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Sasaran 1

Analisis pencapaian **Sasaran 1: Meningkatkan keterpenuhan sarana ibadah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Tempat Ibadah berkualitas baik	99,84	99,84	99,84
Rata-rata capaian	99,84	99,84	99,84

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah** belum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 99,84persen pada tahun 2017 dan

99,84 persen pada tahun 2018.

Sasaran 2

Analisis pencapaian **Sasaran 2: Meningkatnya indeks pendidikan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Rata-rata Lama Sekolah	85,07	87,94	99,27
Harapan Lama Sekolah	104,56	104,64	99,85
Angka Melek Huruf	87	99	97,82
Rata – Rata Capaian	92,21	97,19	98,98

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari **97,19persen** pada tahun 2017 dan **98,98persen** pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **1,79%**

Sasaran 3

Analisis pencapaian **Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Persentase kepesertaan JKN	100	100	104,41
Angka Usia Harapan Hidup	93,49	93,04	99,72
Rata – Rata Capaian	96,74	96,52	102,06

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 96,52 persen pada tahun 2017 dan 102,06 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **5,54%**.

Sasaran 4

Analisis pencapaian **Sasaran 4: Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada tahun 2017 dan 100 persen pada tahun 2018.

Sasaran 5

Analisis pencapaian **Sasaran 5: Meningkatnya kesempatan kerja**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2015	2017	2018
Tingkat pengangguran Terbuka	94,56	56,77	58,06
Rata – Rata Capaian	94,56	56,77	58,06

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 56,77 persen pada tahun 2017 dan 58,06 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **1,29%**.

Sasaran 6

Analisis pencapaian **Sasaran 6: Meningkatnya prestasi keolahragaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	46	54	63,64
Rata – Rata Capaian	46	54	63,64

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 54 persen pada tahun 2017 dan 63,64 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **9,64%**.

Sasaran 7

Analisis pencapaian **Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan gender** , dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2015	2017	2018
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,91	98,79	98,79
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	97,90	99,38	99,38
Rata – Rata Capaian	97,90	99,08	99,08

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** belum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 99,08 persen pada tahun 2017 dan 99,08 persen pada tahun 2018.

Sasaran 8

Analisis pencapaian **Sasaran 8: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	107,04	105,26	116,60
Persentase Kepemilikan Akta Nikah	100	100	185,85
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	142,85	120	124,40
Rata – Rata Capaian	116,63	108,42	142,3

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 108,42 persen pada tahun 2017 dan 142,3 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **33,88%**

Sasaran 9

Analisis pencapaian **Sasaran 9: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** , dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	52,32	52,32	52,32
Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	67,35	67,35	67,35
Rata-rata capaian	59,83	59,83	59,83

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 belum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 59,83% pada tahun 2017, meningkat menjadi 59,83% pada tahun 2018.

Sasaran 10

Analisis pencapaian **Sasaran 10: Meningkatnya kapasitas perhubungan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	100	100	100
Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	82,6	93,25	94,37
Rata – Rata Capaian	182,6	96,62	97,18

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kapasitas perhubungan** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 96,62 persen pada tahun 2017 dan 97,18 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **0,56%**

Sasaran 11

Analisis pencapaian **Sasaran 11 :Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** , dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Cakupan layanan irigasi	109,11	107,03	120,65
Rata – Rata Capaian	109,11	107,03	120,65

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 107,03 persen pada tahun 2017 dan 120,65 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar **13,62%**

Sasaran 12

Analisis pencapaian **Sasaran 12 :Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Lingkungan permukiman kumuh	110,87	109,80	98,55
Rumah tangga bersanitasi	102,20	103,22	104,17
Rasio rumah layak huni	99,47	99,47	67,90
Rata – Rata Capaian	104,18	104,16	90,21

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 104,16persen pada tahun 2017 dan 90,21persen pada tahun 2018. Yaitu penurunan sebesar **13,97%**

Sasaran 13

Analisis pencapaian **Sasaran 13 :Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	79,96	100	126,65
Jumlah produktifitas kokon	120	120	37,50
Rata – Rata Capaian	99,98	110	82,07

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun**

murbei dan tanaman konservasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 110persen pada tahun 2017 dan 82,07persen pada tahun 2018. Yaitu penurunan sebesar **27,93%**

Sasaran 14

Analisis pencapaian **Sasaran 14 :Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu** belum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2017 dan 100 persen pada tahun 2018.

Sasaran 15

Analisis pencapaian **Sasaran 15 :Meningkatnya daya saing ekonomi daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Nilai Ekspor	55,21	78,93	157,86
Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	109,43	108,17	98,78
Lama Tinggal Wisatawan	100	100	100
Jumlah Kunjungan Wisata (mancanegara)	100,69	109,60	106,36
Jumlah Kunjungan Wisata (domestik)	114,86	114,86	114,86
Rata – Rata Capaian	96,038	102,312	115,72

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka

secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 102,312persen pada tahun 2017 dan 115,72persen pada tahun 2018.Yaitu peningkatan sebesar **13,41%**

Sasaran 16

Analisis pencapaian **Sasaran 16 :Meningkatnya ketahanan pangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	103,82	101	90,5
Rata – Rata Capaian	103,82	101	90,5

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 101persen pada tahun 2017 dan 90,5persen pada tahun 2018.Yaitu penurunan sebesar 10,5%

Sasaran 17

Analisis pencapaian **Sasaran 17 :Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Tingkat kemiskinan	97,3	103,94	101,08
Penanganan PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial)	133,3	100	82,11
Rata – Rata Capaian	115,3	153,94	91,6

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Menurunnya tingkat**

kemiskinan dan penanganan PMKS mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 153,94 persen pada tahun 2017 dan 91,6 persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar 62,34%

Sasaran 18

Analisis pencapaian **Sasaran 18: Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	109,32	104,76	33,33
Rasio akseptor KB	101,6	101,50	115,64
Rata – Rata Capaian	105,46	103,31	74,48

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 103,31persen pada tahun 2017 dan 74,48persen pada tahun 2018. Yaitu peningkatan sebesar 28,83% (**Lampiran 18**)

Sasaran 19

Analisis pencapaian **Sasaran 19: Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** jika dibandingkan dengan tahun

lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2017 dan 100persen pada tahun 2018.

Sasaran 20

Analisis pencapaian **Sasaran 20:Meningkatnya keberdayaan desa**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Jumlah Desa Mandiri	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya keberdayaan desa** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada tahun 2017 dan 100 persen pada tahun 2018.

Sasaran 21

Analisis pencapaian **Sasaran 21:Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Indeks Lingkungan Hidup	142,46	105,87	90,50
Ruang Terbuka Hijau	100	110,42	101,89
Rata – Rata Capaian	121,23	108,14	96,195

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 108,14 persen pada tahun 2017 dan 96,195persen pada tahun 2018. Yaitu mengalami penurunan **11,945%**.

Sasaran 22

Analisis pencapaian **Sasaran 22: Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan)	95,01	95,01	90,58
Rata – Rata Capaian	95,01	95,01	90,58

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**, jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 95,01persen pada tahun 2017 dan 90,58persen pada tahun 2018. Yaitu mengalami penurunan **4,43%**.

Sasaran 23

Analisis pencapaian **Sasaran 23: Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Jumlah konflik SARA	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2017 dan 100persen pada tahun 2018.

Sasaran 24

Analisis pencapaian **Sasaran 24: Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Rasio lulusan S1/S2/S3	100	100	12.040
Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	6.070

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2017 dan 6.070persen pada tahun 2018.

Rasio S1/S2/S3 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan adanya kesalahan penentuan target tahun 2018, dimana target tahun 2018 adalah 0,05%, sementara realisasi yang diperoleh sebesar 6,020%. Ini menyebabkan adanya lonjakan nilai capaian yaitu sebesar 12.040%. Untuk kedepannya ini menjadi catatan bagi kami dalam perencanaan penentuan target, agar memperhatikan lebih seksama. (**lampiran 24**).

Sasaran 25

Analisis pencapaian **Sasaran 23 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	100	100	100

Rata – Rata Capaian	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2017 dan 100persen pada tahun 2018.

Sasaran 26

Analisis pencapaian **Sasaran 26: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2016	2017	2018
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	100	100	100
Nilai evaluasi AKIP	100	100	100
Nilai LPPD	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2017 dan 100persen pada tahun 2018.

3.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sasaran 1

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** didukung dengan adanya Program Peningkatan Sarana Ibadah, Program Peningkatan Kesejahteraan Imam Desa / Kelurahan, Imam Dusun / Lingkungan serta Guru Mengaji, dan Program fasilitasi pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan, serta terpenuhinya alokasi anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut diatas.

Sasaran 2

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan**, ini didukung dengan adanya program Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan Program, Pendidikan Non Formal dan Informal, Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan, Program Pengembangan Budaya Baca, Program Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan manajemen pelayanan pendidikan, program peningkatan peran serta kepemudaan, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sasaran 3

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, didukung dengan

adanya Program Penanganan 1000 hari Pertama Kehidupan, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Pengembangan Institusi Pendidikan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata.

Sasaran 4

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli** didukung dengan adanya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Nilai Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Program pengembangan nilai budaya salah satunya adalah melestarikan dan menghargai budaya lokal. Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya.

Sasaran 5

Meningkatnya penangguran merupakan salah satu penurunan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja**, yang

merupakan program kegiatan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif merupakan suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Dengan kata lain, konsep *creative economy* lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi.

Ekonomi kreatif diharapkan akan membantu perekonomian di Kabupaten Wajo dengan berbagai cara, seperti:

- Membuka lapangan kerja baru
- Menekan angka pengangguran
- Menciptakan masyarakat yang kreatif
- Kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat
- Meningkatkan inovasi di berbagai sektor

Inilah yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo dalam meningkatkan Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif.

Sasaran 6

Penurunan pencapaian pada sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** disebabkan menurunnya prestasi cabang olahraga yang telah menjadi target Dinas Pendidikan Olahraga. Beberapa upaya untuk mengatasi penurunan pencapaian tersebut diantaranya mendukung Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Sasaran 7

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** ,didukung dengan adanya

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan program kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran 8

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Penataan Administrasi Catatan Sipil, yang merupakan program kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran 9

Penurunan pencapaian pada sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** disebabkan adanya program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang belum terealisasi seluruhnya dari target yang direncanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Upaya untuk menghadapi hal tersebut maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang membuat Program Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Konstruksi Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaannya, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Keciptakaryaannya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaannya, Program Pembangunan / Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Gorong-Gorong, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Program Pengendalian Banjir. Yang disesuaikan dengan alokasi anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut.

Sasaran 10

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kapasitas perhubungan** yang merupakan program kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Didukung dengan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di pelabuhan/terminal , Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Sasaran 11

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi yang** merupakan program kegiatan dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air didukung adanya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Sungai, Danau, Jaringan Pengairan Lainnya dan PPIP, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

Sasaran 12

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** yang didukung dengan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Pemukiman, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Pemukiman, Program Pembangunan Sarana / Prasarana Air Bersih dan Sanitasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat, Program Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan, Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Sasaran 13

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** yang didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan UPTD, Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Kehutanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditi Perkebunan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan. Akan tetapi disisi lain adanya jumlah prduktivitas kokon yang menurun.

Sasaran 14

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu** merupakan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang didukung oleh Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Sasaran 15

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** didukung oleh program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Sasaran 16

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** didukung oleh program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), program analisis pola pangan konsumsi pangan harapan dengan pendekatan pola pangan harapan (PPH), program lomba cipta menu B2SA, program Hari Pangan Sedunia (HPS), program Expo Gelar Pangan Nusantara, program peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelaku Usaha dalam pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

Sasaran 17

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial)** didukung oleh program pemberdayaan fakir miskin, komoditas adat terpencil , dan PKMS lainnya, program perlindungan dan jaminan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi sosial, program pembinaan para penyandang cacat dan ekstrauma, program pembinaan eks penyakit sosial lainnya, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan program pemberdayaan, perorangan keluarga dan masyarakat.

Sasaran 18

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** didukung oleh program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri, program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga , dan program pengembangan data/informasi keluarga dan kependudukan.

Kesadaran masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dalam sebuah daerah, menandakan bahwa sebuah upaya revolusi paradigma

dalam membawa daerah untuk berkembang dan maju. Semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya ingin melepaskan daerah kita dari keterpurukan akibat laju pertumbuhan penduduknya. Sebab jika hal ini berhasil maka masyarakat kitapun akan mengalami perubahan yang cukup signifikan yakni menuju masyarakat sejahtera

Sasaran 19

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** yang merupakan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar, dan Program Pengembangan Data dan Informasi

Sasaran 20

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya keberdayaan Desa** adalah merupakan Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Prgram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam,Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut,Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup,Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sasaran 22

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran**Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**didukung olehProgram Pengembangan Wawasan Kebangsaan,Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT),Program Pendidikan Politik Masyarakat,Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan TanahProgram Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan,Program Penataan Perundang-undangan,Program Legislasi Daerah,Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran 23

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran**Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat**merupakan program kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan.

Sasaran 24

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran**Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah**didukung olehProgram Pendidikan Kedinasan, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Penataan SOTK Organisasi Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah, Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.



Sasaran 25

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan komunikasi dan informatika, Peningkatan sistem administrasi kearsipan, Peningkatan penanganan pengaduan, Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.



Sasaran 26

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Kesejahteraan imam desa/kelurahan, imam dusun/lingkungan serta guru mengaji, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sasaran 1

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** adalah sebesar Rp.694.245.546,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.655.856.096,00 atau 94,47%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 5,53%.

Sasaran 2

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** adalah sebesar Rp.47.965.226.100,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.43.355.660.632,00 atau 90,39%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 9,61%.

Sasaran 3

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** adalah sebesar Rp.74.364.885.059,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.67.095.155.477,00 atau 90,22%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 9,78%.

Sasaran 4

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli** adalah sebesar Rp.1.183.700.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.977.877.750,00 atau 82,61%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 17,39%.

Sasaran 5

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** adalah sebesar Rp.1.101.985.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.090832.000,00 atau 98,99%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 1,01%.

Sasaran 6

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** adalah sebesar Rp.1.924.200.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.907.337000,00 atau 99,12%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 0,88%.

Sasaran 7

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** adalah sebesar Rp.257.445.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.236.716.000,00 atau 91,95%. Dibandingkan rata-rata capaian

kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 8,05%.



Sasaran 8

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** adalah sebesar Rp.2.313.908.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.023.908.000,00 atau 87,47%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 12,53%.



Sasaran 9

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan** adalah sebesar Rp.105.188.684.918,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.84.604.885.361,00 atau 80,43%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 19,57%.



Sasaran 10

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Perhubungan** adalah sebesar Rp.2.453.854.185,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.262.985.377,00 atau 92,22%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 7,78%.



Sasaran 11

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Cakupan dan**

Efektifitas Layanan Irigasi adalah sebesar Rp.29.802.753.780,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.22.830.475.964,00 atau 76,61%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 23,39%.

Sasaran 12

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Perumahan Layak Huni dan Penataan Permukiman Kumuh** adalah sebesar Rp. 9.842.249.800,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.8.108.211.651,- atau 82,38%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 17,62%.

Sasaran 13

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Produksi Telur Ulat Sutra dan Kokon Dengan Didukung Ketersediaan Daun Murbei dan Tanaman Konservasi** adalah sebesar Rp.1.392.075.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.202.288.300,00 atau 86,37%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 13,63%.

Sasaran 14

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pengembangan Kawasan Terpadu** adalah sebesar Rp.2.732.986.400,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.122.699.000,- atau 77,67%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 22,33%.

Sasaran 15

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah** adalah sebesar Rp.2.451.565.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.212.565.000,00 atau 90,25%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 9,75%.

Sasaran 16

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** adalah sebesar Rp.5.086.658.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5.069.658.000,- atau 99,67%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 0,33%.

Sasaran 17

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penanganan PMKS** adalah sebesar Rp.1.078.720.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.008.720.000,00 atau 93,51%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 6,49%.

Sasaran 18

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah sebesar Rp.5.662.864.300,00 dan dari anggaran

tersebut terealisasi sebesar Rp.4.762.864.300,00 atau 84,11%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 15,89%.

Sasaran 19

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan** adalah sebesar Rp.3.721.690.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.922.567.640,00 atau 78,53%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 21,47%.

Sasaran 20

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Keberdayaan Desa** adalah sebesar Rp.1.239.925.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.197.528.500,00 atau 96,58%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 3,42%.

Sasaran 21

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan** adalah sebesar Rp.3.566.312.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.536.220.904,00 atau 99,16%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 0,84%.

Sasaran 22

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketertiban, Ketenteraman, Keamanan dan Kenyamanan Dalam Masyarakat** adalah sebesar Rp.2.227.786.500,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.100.858.317,- atau 94,30%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 5,70%.

Sasaran 23

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat** adalah sebesar Rp.1.432.270.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.342.270.000,00 atau 93,72%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 6,28%.

Sasaran 24

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** adalah sebesar Rp.2.916.784.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.843.311.561,00 atau 97,48%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 2,52%.

Sasaran 25

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas**

Pelayanan Publik adalah sebesar Rp.4.338.944.078,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.4.140.094.550,00 atau 95,42%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 4,58%.

Sasaran 26

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah** adalah sebesar Rp.3.913.527.640,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.589.863.139,00 atau 91,73%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 8,27%.

3.2.5 Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran 1

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Peningkatan Sarana Ibadah.
- Program Peningkatan Kesejahteraan imam desa / kelurahan, imam dusun / lingkungan serta guru mengaji.
- Program fasilitasi pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan.

Sasaran 2

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** adalah sebanyak 10 Program yaitu, yaitu:

- Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
- Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan.
- Program Pengembangan Budaya Baca.
- Program Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan.
- Program Pengkajian Perencanaan Pendidikan.
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Sasaran 3

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** adalah sebanyak 19 Program, yaitu:

- Program Penanganan 1000 hari Pertama Kehidupan.
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- Program Pengembangan Institusi Pendidikan Kesehatan.
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular.
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

- Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya.
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata.
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata.
- Program Standarisasi pelayanan Kesehatan.
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan.
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran 4

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli** adalah sebanyak 3 Program, yaitu:

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- Program Pengembangan Nilai Budaya.
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran 5

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran 6

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** adalah sebanyak 6 program, yaitu:

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Remaja.
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Sasaran 7

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** adalah sebanyak 4 program, yaitu:

- Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
- Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
- Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sasaran 8

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** adalah sebanyak 2 Program, yaitu:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- Program Penataan Administrasi Catatan Sipil.

Sasaran 9

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** adalah sebanyak 10 Program, yaitu:

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan, Penigkatan dan Pemeliharaan Konstruksi Jalan, Jembatan dan Keciptakarya.
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Keciptakarya.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- Program Pembangunan / Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Gorong-Gorong.
- Program Pembangunan Turap, Talud & Bronjong.
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- Program Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- Program Pengendalian Banjir.

Sasaran 10

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Perhubungan** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Sasaran 11

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** adalah sebanyak 2 program, yaitu:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Sungai, Danau, Jaringan Pengairan Lainnya dan PPIP
- Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

Sasaran 12

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** adalah sebanyak 10 program, yaitu:

- Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Pemukiman.
- Program Pembangunan Sarana / Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.
- Program Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah.
- Program Lingkungan Sehat Perumahan.

- Program Pengembangan Perumahan.
- Program Perencanaan Tata Ruang.
- Program Pemanfaatan Ruang.
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran 13

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya produksi ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** adalah sebanyak 12 program, yaitu:

- Program Penguatan Kelembagaan UPTD
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
- Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- Program Peningkatan Produksi Pertanian / Kehutanan.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditi Perkebunan.
- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan.
- Program Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.

Sasaran 14

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu** adalah sebanyak 1 program, yaitu:

- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Sasaran 15

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** adalah sebanyak 2 program, yaitu:

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran 16

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan (P2KP).
- Program Analisis Pola Pangan Komsumsi Pangan Harapan Dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).
- Program Lomba Cipta Menu B2SA.
- Program Hari Pangan Sedunia (HPS).
- Program Expo Gelar Pangan Nusantara
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Komsumsi dan Keamanan Pangan.

Sasaran 17

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS** adalah sebanyak 7 program, yaitu:

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat Terpencil, Dan PMKS Lainnya.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Ekstrauma
- Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial Lainnya
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan, Perorangan, Keluarga dan Masyarakat

Sasaran 18

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** adalah sebanyak 6 program, yaitu:

- Program Keluarga Berencana.
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Program Pelayanan Kontrasepsi.
- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri.
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
- Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga Dan Kependudukan.

Sasaran 19

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** adalah sebanyak 8 program, yaitu:

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar.
- Program Kerjasama Pembangunan.
- Program Pengembangan Data dan Informasi.

Sasaran 20

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya keberdayaan desa** adalah sebanyak 5 program, yaitu:

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Sasaran 21

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** adalah sebanyak 7 program, yaitu:

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut.
- Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sasaran 22

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat** adalah sebanyak 11 program, yaitu:

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
- Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan.
- Program Penataan Perundang-undangan.
- Program Legislasi Daerah.

- Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran 23

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** adalah sebanyak 2 program, yaitu:

- Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan.

Sasaran 24

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** adalah sebanyak 9 program, yaitu:

- Program Pendidikan Kedinasan.
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
- Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Penataan SOTK Organisasi Perangkat Daerah.
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.
- Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 25

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** adalah sebanyak 16 program, yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan Publik.
- Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
- Program Peningkatan Kesejahteraan, Bantuan Sosial dan Bantuan Hukum Anggota Korpri.
- Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa.
- Program Kerja sama informasi dengan mas media.
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan.
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- Program Menitensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.
- Program Pelayanan Pemadam Kebakaran.

Sasaran 26

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya**

akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- Program Peningkatan Kesejahteraan imam desa/kelurahan, imam dusun/lingkungan serta guru mengaji.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2018 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018.

APBD Kabupaten Wajo Tahun 2018, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Garis besar APBD Tahun 2018 dan realisasinya berdasarkan data, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1,495,477,075,619.00	1,407,637,871,514.33	94.13	1,495,477,075,525
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	158,486,345,674.00	134,035,216,363.33	84.57	158,486,345,589
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,154,313,826.00	34,622,288,206.50	98.49	35,154,313,728
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,772,350,000.00	11,084,758,817.20	75.04	14,772,349,925
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,384,000,000.00	14,144,241,966.00	91.94	15,383,999,908
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93,175,681,848.00	74,183,927,373.63	79.62	93,175,681,768
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,096,294,232,356.00	1,047,331,470,105.00	95.53	1,096,294,232,260
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90,186,863,356.00	52,677,323,808.00	58.41	90,186,863,298
1.2.2	Dana Alokasi Umum	714,224,148,000.00	714,224,148,000.00	100.00	714,224,147,900
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	291,883,221,000.00	280,429,998,297.00	96.08	291,883,220,904
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	240,696,497,589.00	226,271,185,046.00	94.01	240,696,497,495
1.3.1	Pendapatan Hibah	48,189,819,167.00	44,052,471,988.00	91.41	48,189,819,076
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	66,724,907,422.00	56,100,926,841.00	84.08	66,724,907,338
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	122,469,771,000.00	122,163,127,626.00	99.75	122,469,770,900
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	3,312,000,000.00	3,954,658,591.00	119.40	3,311,999,881
2	BELANJA	1,522,528,389,190.50	1,428,620,951,974.56	93.83	1,522,528,389,097
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	898,642,926,630.50	872,719,118,646.39	97.12	898,642,926,533
2.1.1	Belanja Pegawai	604,226,836,600.50	588,451,824,223.30	97.39	604,226,836,503
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	0.00	-
2.1.4	Belanja Hibah	55,800,081,250.00	46,424,274,800.00	83.20	55,800,081,167
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,160,000,000.00	6,034,000,000.00	97.95	6,159,999,902
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah	225,543,207,660.00	225,552,405,660.00	100.00	225,543,207,560
2.1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah	4,654,849,520.00	4,332,345,719.09	93.07	4,654,849,427
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,257,951,600.00	1,924,268,244.00	85.22	2,257,951,515
2.2	BELANJA LANGSUNG	623,885,462,560.00	555,901,833,328.17	89.10	623,885,462,471
2.2.1	Belanja Pegawai	46,137,668,290.00	40,997,759,344.00	88.86	46,137,668,201
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328,032,121,029.00	301,533,674,535.95	91.92	328,032,120,937
2.2.3	Belanja Modal	249,715,673,241.00	213,370,399,448.22	85.45	249,715,673,156
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 27,051,313,571.50	- 20,983,080,460.23	77.57	- 27,051,313,649
3	PEMBIAYAAN DAERAH	43,101,313,571.50	42,798,313,571.50	99.30	43,101,313,472
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35,076,313,571.50	35,076,313,571.50	100.00	35,076,313,472
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35,076,313,571.50	35,076,313,571.50	100.00	35,076,313,472
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0.00	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,025,000,000.00	7,722,000,000.00	96.22	8,024,999,904
3.2.2	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8,000,000,000.00	7,697,000,000.00	96.21	7,999,999,904
3.2.3	Pembayara Pokok Utang	-	-	0.00	-
3.2.5	Utang Pihak Ketiga	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	24,999,900
	PEMBIAYAAN NETTO	27,051,313,571.50	27,354,313,571.50	101.12	27,051,313,470
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	6,371,233,111.27	0.00	-

Sumber: *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018*
(Lampiran 28)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

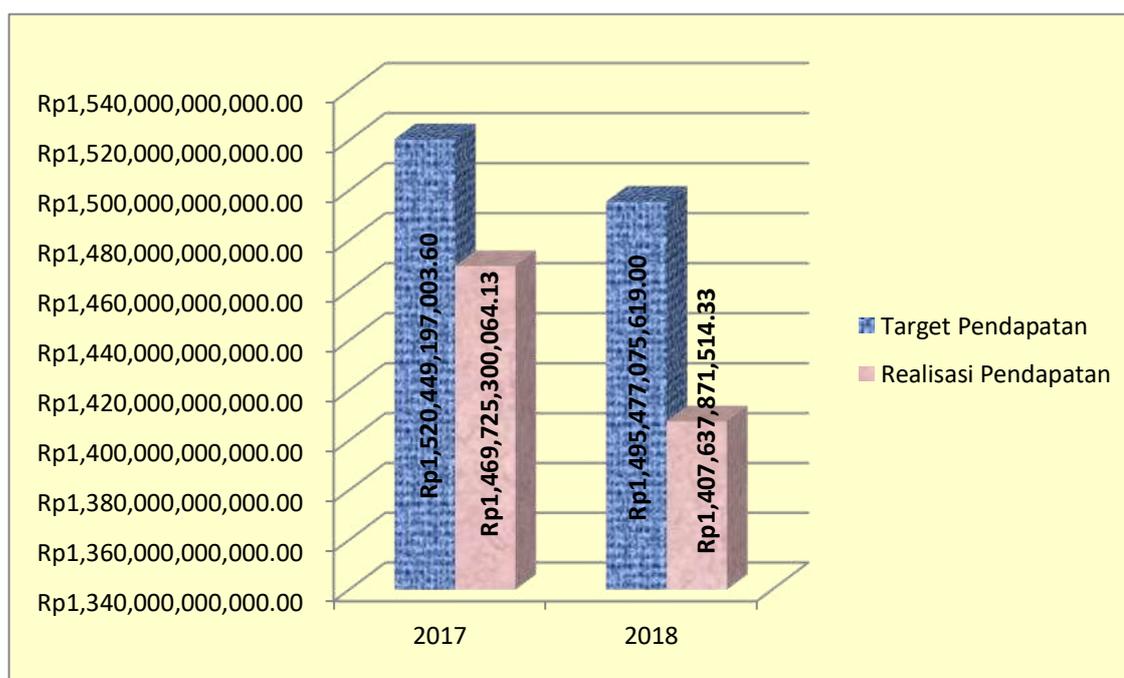
3.3.1 Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Target pendapatan tahun 2017 sebesar Rp.1.520.449.197.003,60 dan di Tahun 2018 menurun menjadi Rp.1.495.477.075.619,00 atau menurun 1,64%. Dan Realisasi pendapatan juga mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebesar Rp.1.469.725.300.064,13 dan di tahun 2018 turun menjadi Rp1.407.637.871.514,33 atau 4,22%.

Realisasi pendapatan untuk Tahun anggaran 2018 tidak memenuhi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo yakni dari target sebesar Rp.1.495.477.075.619,00 dan terealisasi sebesar Rp1.407.637.871.514,33 atau 94,13%.

Diagram 2

Perbandingan Antara Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018

Anggaran capaian pendapatan ini bisa dikatakan sudah maksimal disebabkan karena adanya peningkatan Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2017 ke 2018.

Beberapa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam meningkatkan pencapaian target dan realisasi pendapatan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Perbaikan sistem dan mekanisme penarikan pajak dan retribusi daerah ditempat-tempat strategis sehingga mengurangi resiko kebocoran PAD.
- d. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan.

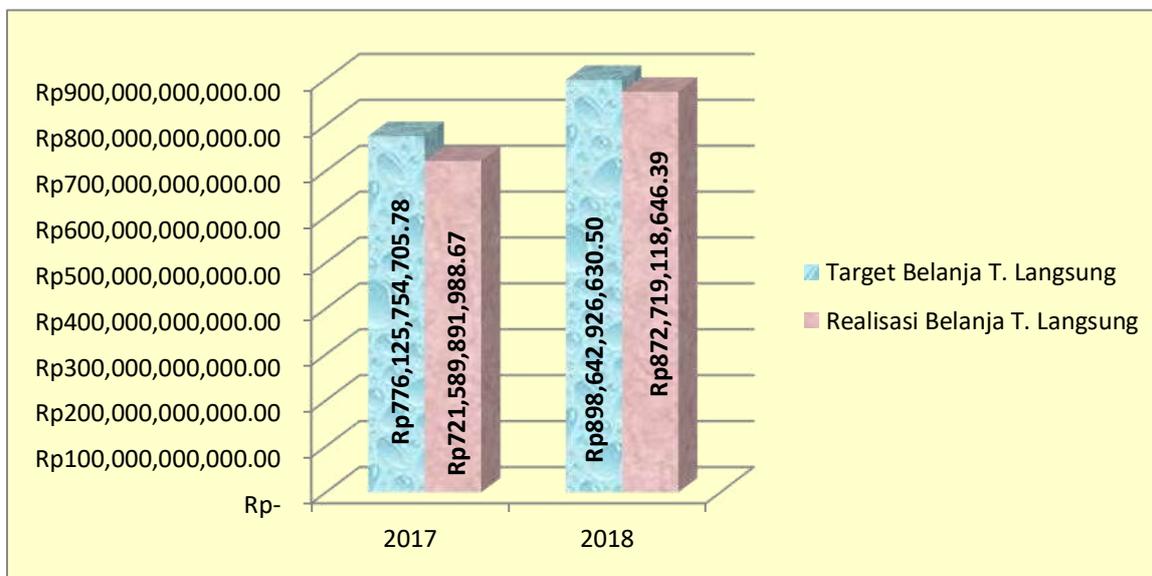
3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

- Target Belanja Tahun 2017 sebesar Rp.776.125.754.705,78 dan Target Belanja Tahun 2018 sebesar Rp.898.642.926.630,50. Anggaran Belanja ini mengalami kenaikan sebesar 15,79%;
- Sedangkan Realisasi Belanja pada Tahun 2017 sebesar Rp.721.589.891.988,67 dan Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp.872.719.118.646,39. Realisasi Anggaran Belanja mengalami kenaikan sebesar 20,94%;
- Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 sebesar Rp.898.642.926.630,50, terealisasi sebesar Rp.872.719.118.646,39 atau 97,12%.

Diagram 3

Perbandingan Antara Target Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018

Realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan pada beberapa belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Pegawai** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Belanja sebesar Rp.550.571.797,702,78 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.539.156.095,559,00 atau 97,93%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.604.226.836.600,50 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.588.451.824.223,30 atau 97,39%. Sehingga mengalami kenaikan pada Target Belanja sebesar 9,75% dengan Realisasi Belanja sebesar 9,14%;
- Untuk Anggaran **Belanja Bunga** hanya adapada Tahun 2017 saja dengan Target Belanja sebesar Rp.70.000.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.16.439.758,94 atau 23,49%;
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Hibah** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Belanja sebesar Rp.28.084.792,854,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.27.022.312,000,00 atau 96,22%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.55.800.081.250,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.46.424.274.800,00 atau 83,20%. Anggaran ini mengalami kenaikan pada Target Belanja sebesar 98,68% dan kenaikan pada Realisasi Belanja sebesar 71,80%;
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Bantuan Sosial** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Belanja sebesar Rp.55.000.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.39.725.000,00 atau 72,23%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.6.160.000.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.6.034.000.000,00 atau 97,95%. Anggaran ini mengalami kenaikan pada Target Belanja dan Realisasi sebesar 100%;
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Belanja sebesar Rp.194.553.246,914,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.153.680.732,709,83 atau 78,99%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.225.543.207.660,00 dan Realisasi Belanja sebesar

Rp.225.552.405.660,00 atau 100%. Anggaran ini mengalami kenaikan pada Target Belanja dan Realisasi sebesar 100%;

- Untuk Anggaran **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa** hanya adapada Tahun 2018 saja yaitu dengan Target Belanja sebesar Rp.4.654.849,520,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.4.332.345,719,09 atau 93,07%;
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Tidak Terduga** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Belanja sebesar Rp.2.790.917,235,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.458.616,360,90 atau 52,26%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.2.257.951.600,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.924.268.244,00 atau 85,22%. Sehingga mengalami penurunan pada Target Belanja sebesar 19,10% dan kenaikan pada Realisasi Belanja sebesar 31,92%;

3.3.3 Belanja Langsung

Target dan Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

- Target Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp.792.207.359.959,00 dan Target Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.555.901.833.328,17. Target Anggaran mengalami penurunan sebesar 29,83%;
- Sedangkan Realisasi Belanja pada Tahun 2017 sebesar Rp.761.132.924.785,14 dan Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp.514.861.067.729,17. Sehingga mengalami penurunan sebesar 32,26%;
- Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 sebesar Rp.555.901.833.328,17, terealisasi sebesar Rp.514.861.067.729,17 atau 92,62%.

Diagram 4

Perbandingan Antara Target Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018

Realisasi belanja yang tidak maksimal disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Pegawai** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Anggaran sebesar Rp.57.489.480,625,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.56.651.036,867,00 atau 98,54%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Anggaran sebesar Rp.40.997.759.355,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.32.334.420.594,00 atau 78,87%. Anggaran ini mengalami penurunan pada Target Anggaran sebesar 28,69% dengan penurunan Realisasi Belanja sebesar 42,92%;
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Barang dan Jasa** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Anggaran sebesar Rp.345.918.192,552,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.333.630.960,857,24 atau 96,45%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Anggaran sebesar Rp.301.533.674.535,95 dan Realisasi Belanja sebesar

Rp.278.287.027.325,95 atau 92,29%, sehingga anggaran mengalami penurunan pada Target Anggaran sebesar 12,83% dengan penurunan Realisasi Belanja sebesar 16,59%;

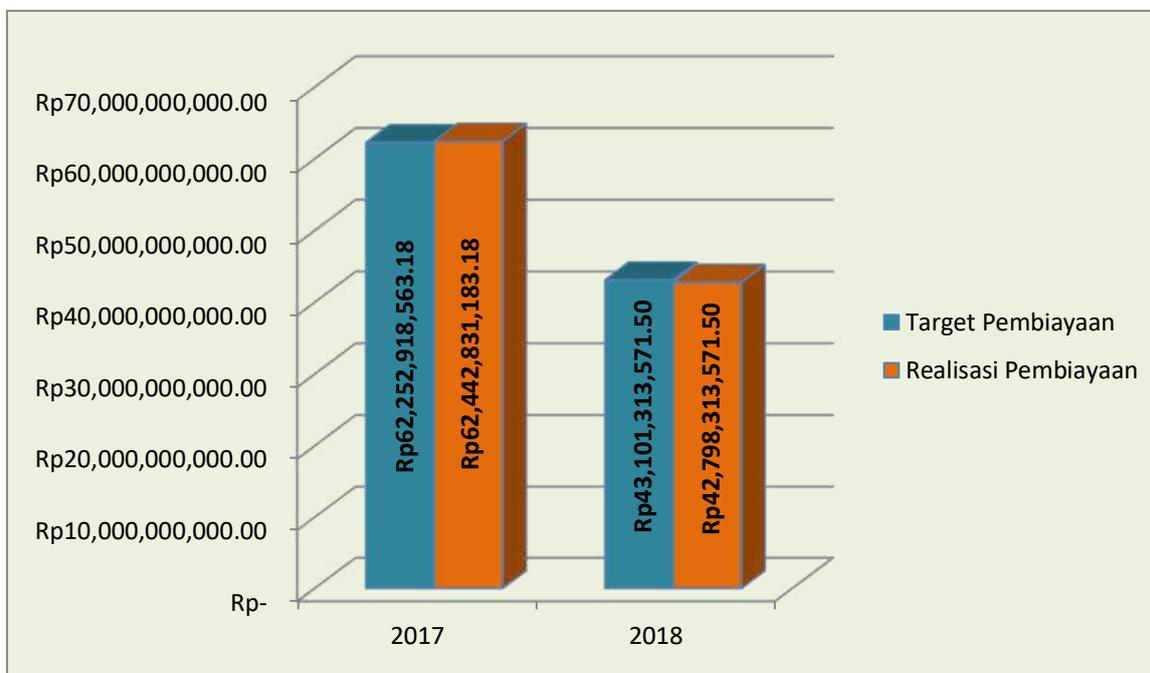
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Modal** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Anggaran sebesar Rp.388.799.686,782,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.370.850.927,060,99 atau 95,38%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Anggaran sebesar Rp.213.370.399.448,33 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.204.239.619.809,22 atau 95,72%, Sehingga anggaran ini mengalami penurunan pada Target Anggaran sebesar 45,12% dengan penurunan Realisasi Belanja sebesar 44,93%;

3.3.4 Pembiayaan Daerah

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

- Target Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp.62.252.918.563,18 dan Target Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.43.101.313.571,50. sehingga mengalami penurunan sebesar 30,76%;
- Sedangkan Realisasi Belanja pada Tahun 2017 sebesar Rp.62.442.831.183,18 dan Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp.42.798.313.571,50, Sehingga anggaran ini mengalami penurunan sebesar 31,46%;
- Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 sebesar Rp.43.101.313.571,50, terealisasi sebesar Rp.42.798.313.571,50 atau 99,30%.

Diagram 5
Perbandingan Antara Target Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018

Realisasi Pembiayaan Daerah yang tidak maksimal disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran untuk **Penerimaan Pembiayaan Daerah** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Pembiayaan sebesar Rp.55.068.418,112,18 dan Realisasi 100%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Pembiayaan sebesar Rp.35.076.313.571,50 dan Realisasi Pembiayaan 100%. Target Anggaran dan Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 36,30%;
- Perubahan Anggaran untuk **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** yaitu pada Tahun 2017 dengan Target Anggaran Pembiayaan sebesar Rp.7.184.500.451,00 dan Realisasi Pembiayaan sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2018 Target Anggaran Pembiayaan sebesar Rp.8.025.000.000,00 dan Realisasi Belanja

sebesar Rp.7.722.000.000,00 atau 96,22%. Target anggaran mengalami peningkatan sebesar 11,70% dengan Realisasi Peningkatan Belanja sebesar 7,48%;

Secara umum penurunan persentase capaian belanja dari tahun sebelumnya disebabkan oleh:

- a. Adanya efesiensi belanja pada SKPD sedangkan target dan realisasi tetap tercapai.
- b. Adanya pendapatan daerah yang diterima pada akhir tahun sehingga belanja tidak dapat dilakukan pada tahun berkenaan.
- c. Adanya pekerjaan yang kontrak kerjanya berakhir pada tanggal 30 dan 31 Desember, sehingga pembayarannya dilaksanakan di tahun berikutnya.
- d. Adanya beberapa pekerjaan yang terkendala pada mekanisme perizinan dari pemerintah pusat dan syarat/teknis pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan perda untuk pelaksanaan pekerjaannya.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
- b. Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
- c. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo tepat waktu.
- d. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah dan pemerintah provinsi terkait dengan penerimaan daerah.
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP/LKjIP Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat skala nilai kinerja tinggi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 dan berdasarkan realisasi anggaran, penggunaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2018 adalah sebanyak **Rp.3.061.106.778.381,00,-** telah menggunakan anggaran sebesar **Rp.2.814.872.065,39,-** (91,96%) secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo adalah % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo perlu

di optimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wajo.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun **2014-2019** sebanyak **47 (empat puluh tujuh)** indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- **Sangat Memuaskan (lebih dari 100 persen) sebanyak 14 indikator**
- **Memuaskan (capaian di antara 75 persen-100 persen) sebanyak 25 indikator**
- **Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 5 indikator**
- **Kurang memuaskan (capaian kurang dari 55 persen) sebanyak 3 indikator**

*Dari 47 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **29,78%** telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, **53,20%** telah memenuhi kriteria memuaskan, **10,63%** telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, **6,38%** telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Wajo Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.*

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wajo.

Sengkang, 20 Maret 2019

BUPATI WAJO,

DR. H.AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si